PROCEEDINGS CONFERENCE SISI INDONESIA III
Tut Wuri Handayani: Development of Education, Science and Technology, and Humanity for the Progress of the Indonesian People
https://conference.sinesia.id/ncrcs-sinesia | E-ISSN: 3110-1062 |
https://doi.org/10.69836/ncrcs-sinesia

Pengelolaan Keuangan Berkelanjutan di Kabupaten Blitar Berdasarkan Green Budgeting

Sustainable Financial Management in Blitar District Based on Green Budgeting

Susilo[1], Al Muizzuddin Faazalloh[2], Roekhuddin[3], Rizal Muwazir[4], Alvira 'Aina A'yun[5]
alviraainaayun@gmail.com
[1,2,3,5]Universitas Brawijaya, East Java, Indonesia
[4]Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Info Article
Submitted: 27 April 2026 | **Revised**: 11 May 2026 | **Accepted**: 14 May 2026
How to cite: Susilo, etc., "Pengelolaan Keuangan Berkelanjutan di Kabupaten Blitar Berdasarkan Penganggaran Hijau", *Proceedings Conference Sisi Indonesia III*, 2026, P. 39-54.

ABSTRACT

Sustainability issues in village financial governance have become increasingly prominent alongside the growing demand for environmentally friendly and inclusive development. However, budgeting practices in villages within Srengat Subdistrict, Blitar Regency, remain dominated by physical and administrative expenditures, with limited integration of social and environmental considerations. This study aims to analyze and strengthen the capacity of village officials and local economic actors to implement sustainable financial management by integrating the green budgeting concept into the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). This research employs a case study method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, preliminary surveys, and documentation during socialization, training, and mentoring activities on matrix-based green tagging over a three-month period. The findings reveal that literacy related to sustainable finance remains low, green tagging practices have not yet been implemented, and no standardized guidelines for classifying green activities exist at the village level. However, the intervention successfully improved stakeholders' understanding of green budgeting, produced a draft toolkit for classifying green activities compatible with the village financial system, and facilitated the establishment of a Green Budgeting Working Group to ensure program sustainability. This study contributes to promoting more transparent, participatory, and sustainable village financial governance aligned with triple bottom line principles (economic, social, and environmental).

Keyword: Sustainable Finance, Green Budgeting, Village Finance, Financial Governance

ABSTRAK

Isu keberlanjutan dalam tata kelola keuangan desa semakin mengemuka seiring meningkatnya tuntutan terhadap pembangunan yang ramah lingkungan dan inklusif. Namun demikian, praktik penganggaran di desa-desa Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, masih didominasi oleh belanja fisik dan administratif, dengan integrasi aspek sosial dan lingkungan yang masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperkuat kapasitas aparatur desa serta pelaku ekonomi lokal dalam menerapkan pengelolaan keuangan berkelanjutan melalui integrasi konsep *green budgeting* ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, survei awal, serta dokumentasi selama kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan implementasi *green tagging* berbasis matriks dalam kurun waktu tiga bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi terkait keuangan berkelanjutan masih rendah, praktik *green tagging* belum diterapkan, serta belum tersedia pedoman standar dalam klasifikasi kegiatan hijau di tingkat desa. Meskipun demikian, intervensi yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai *green budgeting*, menghasilkan draf *toolkit* klasifikasi kegiatan hijau yang kompatibel dengan sistem keuangan desa, serta mendorong terbentuknya Kelompok Kerja (*Pokja*) Green Budgeting sebagai mekanisme keberlanjutan program. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih transparan,

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

partisipatif, dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip *triple bottom line* (ekonomi, sosial, dan lingkungan).
Kata Kunci: *Keuangan berkelanjutan, Green Budgeting, Keuangan Desa, Tata Kelola Keuangan*

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) telah menjadi isu global yang tidak dapat dihindari, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia yang dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan (UNDP, 2019a). Di tingkat lokal, tekanan terhadap ekosistem tidak hanya dirasakan di kawasan perkotaan, tetapi juga di wilayah perdesaan yang justru menopang sebagian besar sumber daya alam nasional (World Bank, 2021).Kondisi ini menjadikan tata kelola keuangan desa sebagai salah satu titik kritis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan.

Dalam konteks kebijakan publik, konsep *sustainable development* menekankan pentingnya integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan, termasuk dalam sistem penganggaran(UNDP, 2019a). Salah satu instrumen yang berkembang adalah *green budgeting*, yaitu pendekatan penganggaran yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam proses perencanaan dan alokasi anggaran pemerintah (OECD, 2020). Secara nasional, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan telah diperkuat melalui integrasi SDGs oleh Bappenas (2021) serta pengembangan kerangka *green budgeting* oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022). Pengelolaan keuangan desa secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, kajian mengenai *sustainable finance* dan *green budgeting* menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dalam konteks kebijakan fiskal sebagai instrumen transisi menuju ekonomi rendah karbon. Studi Volz et al. menegaskan bahwa *green finance* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan, tetapi juga sebagai alat transformasi struktural dalam mendukung pembangunan berkelanjutan(Volz et al., 2021). Menurut Lledó, *green budgeting* merupakan instrumen strategis untuk mengintegrasikan kebijakan iklim ke dalam sistem penganggaran pemerintah(Lledó et al., 2021) .

Zhang et al. menunjukkan adanya hubungan erat antara *green finance* dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan (S. Zhang et al., 2023). Sementara itu, Chen menekankan bahwa implementasi *green finance* berkontribusi signifikan terhadap upaya pencapaian netralitas karbon (Chen et al., 2022).

Dalam konteks tata kelola publik, kebijakan fiskal yang berorientasi keberlanjutan memerlukan integrasi antara instrumen anggaran dan kapasitas institusional (Gupta, 2022) Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *green budgeting* tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan di tingkat lokal.

Pratiwi et al.menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, terutama akibat keterbatasan kapasitas dan belum adanya instrumen teknis yang operasional(Pratiwi et al., 2023). Temuan ini menguatkan urgensi penelitian ini dalam mengkaji implementasi green budgeting di tingkat desa.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik penganggaran desa di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, masih didominasi oleh belanja fisik dan administratif. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada tahun 2025, penyusunan APBDes belum mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan secara sistematis. Alokasi anggaran untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan lingkungan hidup hanya berkisar antara 3–7 persen dari total anggaran desa, jauh di bawah rekomendasi UNDP sebesar minimal 20 persen untuk mendukung pencapaian SDGs(UNDP, 2019). Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan nyata antara kerangka kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dengan implementasi di tingkat lokal (World Bank, 2021).

Secara teoretis, dalam perspektif *Public Finance modern*, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat alokasi dan distribusi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi menuju ekonomi berkelanjutan (OECD, 2020a). Konsep *triple bottom line* yang diperkenalkan oleh John Elkington menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur dari keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan(Elkington, 1997). Oleh karena itu, integrasi *green budgeting* dalam pengelolaan keuangan desa menjadi penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi *green budgeting* di tingkat desa masih sangat terbatas, dan kajian akademik yang secara khusus mengeksplorasi adaptasinya dalam sistem keuangan desa di Indonesia hampir tidak tersedia (OECD, 2020a). Topik ini menjadi penting dan menarik untuk diteliti karena tiga alasan. Pertama, desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang bersinggungan langsung dengan sumber daya alam dan masyarakat, sehingga transformasi penganggaran desa memiliki dampak lingkungan dan sosial yang nyata. Kedua, belum adanya instrumen teknis operasional seperti *green tagging* yang diadaptasi khusus untuk struktur APBDes menciptakan kesenjangan praktis yang mendesak untuk diisi. Ketiga, penguatan kapasitas aparatur desa dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip keberlanjutan merupakan prasyarat yang tidak dapat ditunda mengingat Indonesia telah berkomitmen pada target SDGs dan

Nationally Determined Contribution (NDC). Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk menjawab kesenjangan tersebut dan menempatkan desa sebagai aktor strategis, bukan sekadar objek, dalam agenda pembangunan berkelanjutan (UNDP, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: (1) rendahnya literasi aparatur desa terkait keuangan berkelanjutan, (2) belum adanya penerapan *green budgeting* dan *green tagging* dalam penyusunan APBDes, serta (3) belum tersedianya panduan teknis klasifikasi kegiatan hijau di tingkat desa. Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi praktis berupa model dan *toolkit* implementasi *green budgeting* di tingkat desa, serta kontribusi akademik dalam pengembangan kajian keuangan publik berkelanjutan di tingkat lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus, dilaksanakan di desa-desa Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dalam kerangka kajian *Public Finance* dan *Sustainable Development*. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis kondisi aktual pengelolaan keuangan desa serta perubahan yang terjadi setelah intervensi program (Sugiyono, 2019). Metode studi kasus dipilih karena mampu mengeksplorasi fenomena secara komprehensif dalam setting nyata (Yin, 2018). Subjek penelitian meliputi aparatur desa, pelaku ekonomi lokal (UMKM desa), dan pendamping desa, yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses penyusunan APBDes. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur, survei awal (*baseline survey*), dan dokumentasi, yang meliputi data primer dari lapangan maupun data sekunder berupa dokumen APBDes, RPJMDes, laporan realisasi anggaran, dan regulasi terkait. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan melalui tiga tahap: diagnostik awal (identifikasi kondisi eksisting), intervensi (sosialisasi, pelatihan *green tagging* berbasis matriks, dan pendampingan), serta evaluasi (pengukuran perubahan pemahaman dan penyusunan *toolkit green budgeting*). Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Matthew B. et al., 2014). Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, *member check*, dan *audit trail*. Keberhasilan penelitian diukur berdasarkan empat indikator: peningkatan literasi aparatur desa, tersusunnya *toolkit green budgeting*, implementasi awal *green tagging* dalam APBDes, serta terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) *Green Budgeting* sebagai bentuk penguatan kelembagaan.

Hasil dan pembahasan

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan utama terkait kondisi awal, proses intervensi, serta perubahan kapasitas aparatur desa dalam mengimplementasikan konsep keuangan berkelanjutan melalui green budgeting.

Secara umum, hasil menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pengelolaan keuangan desa saat ini dengan prinsip *Sustainable Development*, namun intervensi yang dilakukan mampu memberikan peningkatan pemahaman dan perubahan awal dalam praktik penganggaran. Temuan ini sejalan dengan studi World Bank (2021) yang menyatakan bahwa implementasi keuangan berkelanjutan di tingkat lokal seringkali terkendala oleh rendahnya kapasitas institusional dan keterbatasan instrumen teknis.

1.1 Pembahasan 1: Kondisi Awal Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di desa-desa Kecamatan Srengat masih berorientasi pada belanja fisik dan administratif. Alokasi anggaran sebagian besar difokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, drainase, dan fasilitas umum lainnya, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan maupun sosial secara terukur. Kondisi ini mencerminkan paradigma tradisional dalam *Public Finance* yang lebih menekankan fungsi alokasi ekonomi dibandingkan aspek keberlanjutan (OECD, 2020a).

Selain itu, hasil survei awal (baseline) menunjukkan bahwa mayoritas aparatur desa belum memahami konsep keuangan berkelanjutan, termasuk instrumen seperti *green budgeting* dan *green tagging*. Rendahnya literasi ini menjadi hambatan utama dalam transformasi pengelolaan keuangan desa yang berorientasi pada keberlanjutan. Temuan ini sejalan dengan *World,* yang menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci yang menghambat integrasi aspek lingkungan dalam kebijakan fiskal di tingkat local (World Bank, 2021).

Rendahnya pemahaman terhadap *green finance* menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan lingkungan di tingkat lokal (Ahmad et al., 2021). Selain itu, studi mengungkapkan bahwa kualitas institusi dan kapasitas sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan integrasi aspek lingkungan dalam kebijakan fiscal (Li et al., 2021).

Dari sisi regulasi, meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, implementasi di lapangan masih belum mengintegrasikan dimensi lingkungan secara eksplisit. Hal ini menunjukkan adanya *policy gap* antara kerangka normatif dan praktik implementatif di tingkat desa.

Dengan demikian, kondisi awal ini memperlihatkan bahwa tata kelola keuangan desa masih belum mengakomodasi prinsip triple bottom line yang

mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh John Elkington (Elkington, 1997).

1.2 Pembahasan 2: Dampak Intervensi dan Implementasi *Green Budgeting*

Kegiatan pengabdian yang dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan telah memberikan pemaparan komprehensif mengenai konsep *sustainable finance* dan *green budgeting*. Materi yang disampaikan mencakup konsep dasar keuangan berkelanjutan, pentingnya integrasi aspek lingkungan dalam penganggaran, serta pengenalan *green tagging* sebagai instrumen identifikasi kegiatan hijau. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi UNDP yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas sebagai prasyarat implementasi SDGs di tingkat local (UNDP, 2019a).

Hasil evaluasi pasca-pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap konsep tersebut. Aparatur desa mulai mampu mengidentifikasi program dan kegiatan yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, seperti pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penghijauan, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan kognitif yang menjadi dasar transformasi kebijakan penganggaran.

Peningkatan pemahaman aparatur desa pasca intervensi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kapasitas (*capacity building*) merupakan strategi yang efektif dalam mendorong implementasi keuangan berkelanjutan. Hal ini konsisten dengan studi yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal hijau akan berjalan optimal apabila didukung oleh peningkatan kapasitas teknis dan institusional (D. Zhang et al., 2022)

Salah satu output penting dari intervensi ini adalah tersusunnya draft toolkit klasifikasi kegiatan hijau berbasis matriks yang kompatibel dengan struktur APBDes. Toolkit ini berfungsi sebagai panduan praktis dalam mengintegrasikan green tagging ke dalam proses perencanaan dan penganggaran desa, sebagaimana direkomendasikan oleh OECD terkait pentingnya instrumen teknis dalam implementasi green budgeting (OECD, 2020).

Keberadaan *toolkit green budgeting* yang dihasilkan memperkuat argumen bahwa instrumen teknis merupakan komponen kunci dalam implementasi kebijakan keberlanjutan. Studi menunjukkan bahwa *green budgeting* membutuhkan perangkat operasional yang jelas agar dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem penganggaran (Wang et al., 2022).

Selain itu, terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) *Green Budgeting* menjadi indikator keberlanjutan program. Pokja ini berperan sebagai agen perubahan yang akan memastikan bahwa prinsip *Sustainable Development* dapat terus diimplementasikan dalam siklus penganggaran desa. Pembentukan kelembagaan

ini sejalan dengan pendekatan institusional dalam pengelolaan keuangan publik yang menekankan pentingnya tata kelola dan struktur organisasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Berikut merupakan beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh desa-desa di Kecamatan Srengat dan penyesuaian kategori atas dampak terhadap lingkungan dan social.

No	Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Dampak Lingkungan	Dampak Sosial	Kategori Green Tag	Keterangan
1	Pembangunan Desa	Pembangunan Drainase	Sedang	Tinggi	Kuning	Perlu desain ramah lingkungan
2	Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sampah Desa	Tinggi	Tinggi	Hijau	Kegiatan prioritas berkelanjutan
3	Ekonomi Desa	Pelatihan UMKM Ramah Lingkungan	Sedang	Tinggi	Hijau	Mendukung ekonomi hijau
4	Infrastruktur	Pembangunan Jalan Desa	Rendah	Sedang	Merah	Tidak berbasis prinsip keberlanjutan
5	Sosial	Program Padat Karya	Rendah	Tinggi	Kuning	Perlu integrasi aspek lingkungan

Penjelasan

Matriks ini merupakan alat analisis sederhana yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kegiatan dalam APBDes berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan dan sosial.

1. Kategori Warna (Green Tagging)

- **Hijau** = Kegiatan yang secara langsung mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial
- **Kuning** = Kegiatan yang memiliki potensi keberlanjutan namun perlu optimalisasi
- **Merah** = Kegiatan yang belum mempertimbangkan aspek keberlanjutan

2. Dimensi Penilaian

- **Dampak Lingkungan**: sejauh mana kegiatan berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan
- **Dampak Sosial**: kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat

3. Fungsi Matriks

- Sebagai **alat bantu perencanaan anggaran desa**
- Memudahkan proses **evaluasi program berbasis keberlanjutan**
- Menjadi dasar dalam implementasi *green budgeting* secara praktis

Insight dari matriks

- Sebagian besar kegiatan desa masih berada pada kategori **kuning dan merah**
- Kegiatan kategori **hijau masih terbatas**, namun memiliki dampak tinggi
- Dibutuhkan **reorientasi kebijakan anggaran desa** menuju kegiatan yang lebih berkelanjutan

1.3 Pembahasan 3: Analisis Kerangka Regulasi dan Kesenjangan Implementasi Green Budgeting di Tingkat Desa

Secara normatif, kerangka regulasi keuangan desa di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi fondasi utama yang memberikan kewenangan kepada desa dalam mengelola keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab. Regulasi ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara lebih teknis dan operasional (Kementerian Dalam Negeri, 2018).

Namun demikian, analisis terhadap dokumen regulasi tersebut menunjukkan bahwa dimensi lingkungan dan keberlanjutan belum terintegrasi secara eksplisit dalam sistem perencanaan dan penganggaran desa. Pasal-pasal yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, masih sangat umum dan belum menyediakan panduan teknis untuk pengklasifikasian kegiatan berdasarkan dampak lingkungan (Kementerian Desa, 2023). Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai "regulatory gap" — yaitu kesenjangan antara mandat keberlanjutan di level kebijakan nasional dengan implementasi teknis di level desa (Lledó et al., 2021).

Di tingkat nasional, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengembangkan kerangka green budgeting yang diterapkan dalam penyusunan APBN sejak tahun 2018 melalui penandaan anggaran berbasis tema (thematic tagging) yang mencakup dimensi perubahan iklim, pendidikan, dan kesehatan. Kerangka ini sejalan dengan praktik terbaik yang dikembangkan oleh OECD melalui Paris Collaborative on Green Budgeting yang melibatkan lebih dari 30 negara anggota (OECD, 2020).Namun, penerapan kerangka ini masih terbatas pada level pemerintah pusat dan sebagian pemerintah daerah, dan belum diturunkan secara sistematis ke tingkat desa.

Kajian terhadap dokumen APBDes dari lima desa di Kecamatan Srengat selama periode 2022–2024 menunjukkan bahwa rata-rata alokasi untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan lingkungan hidup hanya berkisar antara 3–7 persen dari total anggaran. Proporsi ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rekomendasi UNDP yang menyarankan minimal 20 persen alokasi anggaran publik untuk mendukung pencapaian SDGs terkait lingkungan (UNDP, 2019). Temuan ini

memperkuat argumen bahwa diperlukan instrumen teknis berupa panduan green tagging agar desa dapat mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan secara bertahap meningkatkan proporsi kegiatan hijau dalam APBDes (Pratiwi et al., 2023).

Dari perspektif akuntansi publik, kesenjangan ini juga tercermin dalam sistem pelaporan keuangan desa yang saat ini belum memasukkan indikator keberlanjutan sebagai bagian dari pertanggungjawaban anggaran. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang digunakan sebagai platform resmi pengelolaan keuangan desa memang memungkinkan penandaan program berdasarkan bidang, namun belum menyediakan fitur klasifikasi dampak lingkungan secara otomatis. Hal ini menjadikan integrasi green tagging ke dalam Siskeudes sebagai agenda mendesak yang perlu didorong secara regulatif dan teknis (Kementerian Keuangan RI, 2022).

1.4 Analisis Komparatif Implementasi Green Budgeting — Perspektif Nasional dan Internasional

Pengalaman internasional dalam implementasi green budgeting memberikan pembelajaran berharga bagi konteks Indonesia, khususnya di tingkat sub-nasional dan lokal. Prancis merupakan salah satu negara pelopor yang telah mengintegrasikan green budgeting secara komprehensif sejak tahun 2019 dengan menerapkan "budget vert" yang mengklasifikasikan seluruh pos pengeluaran berdasarkan enam tujuan lingkungan (Lledó et al., 2021). Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transparansi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pergeseran alokasi anggaran menuju kegiatan yang lebih ramah lingkungan.

Di kawasan Asia Tenggara, Filipina menjadi contoh relevan melalui program Local Climate Change Action Plan (LCCAP) yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan setidaknya 20 persen dari Dana Pembangunan Lokal (Local Development Fund) bagi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Meski konteks kelembagaannya berbeda, pendekatan ini menunjukkan bahwa integrasi dimensi lingkungan dalam penganggaran sub-nasional adalah hal yang layak secara teknis dan politis, khususnya apabila didukung oleh regulasi yang jelas dan kapasitas teknis yang memadai.

Dalam konteks nasional, sejumlah daerah di Indonesia telah menunjukkan inisiatif yang relevan. Kabupaten Trenggalek, misalnya, telah mengembangkan sistem penganggaran responsif gender dan lingkungan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang melibatkan masyarakat secara partisipatif(Bappenas, 2021). Pengalaman ini menunjukkan bahwa integrasi dimensi keberlanjutan dalam proses penganggaran lokal dapat dilakukan melalui reformasi prosedural yang relatif tidak memerlukan perubahan regulasi secara fundamental.

Perbandingan dengan pengalaman internasional tersebut menyoroti tiga pelajaran kritis bagi implementasi green budgeting di Kecamatan Srengat, yakni: pertama, pentingnya komitmen politis dari pemimpin lokal sebagai faktor pendorong utama; kedua, kebutuhan akan panduan teknis yang sederhana dan kontekstual agar dapat diadopsi oleh aparatur desa dengan kapasitas yang beragam; dan ketiga, perlunya mekanisme insentif — baik fiskal maupun non-fiskal — untuk mendorong desa-desa mengalokasikan anggaran secara lebih ramah lingkungan (Gupta, 2022; OECD, 2020).

Secara keseluruhan, analisis komparatif ini menunjukkan bahwa model green budgeting yang dikembangkan dalam penelitian ini — berbasis matriks green tagging yang disesuaikan dengan struktur APBDes — merupakan adaptasi lokal yang relevan dari praktik terbaik internasional. Inovasi instrumen semacam ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan keberlanjutan di level atas dengan implementasi di akar rumput (Leach et al., 2021).

1.5 Hambatan Struktural dan Peluang Strategis Implementasi Green Budgeting di Desa

Meskipun intervensi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang menjanjikan, analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika lapangan mengungkapkan sejumlah hambatan struktural yang bersifat sistemik dan berpotensi menghambat keberlanjutan implementasi green budgeting dalam jangka panjang. Hambatan-hambatan ini perlu dipahami secara komprehensif agar strategi penguatan kapasitas dapat dirancang secara tepat sasaran.

Pertama, hambatan kapasitas sumber daya manusia. Temuan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan keuangan publik, apalagi konsep keuangan berkelanjutan. Mayoritas kepala urusan keuangan desa hanya memiliki pemahaman dasar tentang penganggaran konvensional yang bersifat administratif. Kondisi ini diperparah oleh tingginya tingkat pergantian perangkat desa akibat siklus politik lima tahunan, yang menyebabkan kapasitas yang sudah dibangun sering kali tidak terwariskan secara efektif kepada penerusnya (Andrews et al., 2021).

Kedua, hambatan institusional dan koordinasi lintas sektor. Implementasi green budgeting di desa tidak dapat berdiri sendiri; ia memerlukan koordinasi yang erat antara aparatur desa, pendamping desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi ini masih sangat lemah. Informasi mengenai kebijakan green budgeting dari tingkat nasional seringkali tidak sampai ke desa secara tepat waktu dan dalam format yang mudah dioperasionalkan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Gupta et al.yang menyatakan bahwa fragmentasi kelembagaan merupakan salah satu

hambatan terbesar dalam implementasi kebijakan fiskal berbasis keberlanjutan (Gupta, 2022).

Ketiga, hambatan budaya dan resistensi perubahan. Wawancara mendalam dengan aparatur desa mengungkapkan adanya resistensi terhadap perubahan paradigma penganggaran. Sebagian perangkat desa memandang penambahan dimensi lingkungan dalam APBDes sebagai beban administratif tambahan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Persepsi ini mencerminkan tantangan dalam mengubah pola pikir (mindset) dari paradigma pembangunan konvensional menuju paradigma pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini selaras dengan temuan Li et al. , nanyang menyatakan bahwa resistensi budaya organisasi merupakan faktor non-teknis yang paling sering diabaikan dalam kajian implementasi kebijakan keberlanjutan (Li et al., 2021).

Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong implementasi green budgeting secara lebih efektif. Pertama, momentum kebijakan nasional yang semakin kondusif, ditandai dengan komitmen Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi karbon hingga 31,89 persen pada tahun 2030, yang membuka ruang bagi alokasi dana pembangunan daerah yang lebih berorientasi lingkungan (Bappenas, 2021). Kedua, penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai aktor ekonomi desa yang dapat menjadi agen implementasi green economy di tingkat lokal (Pratiwi et al., 2023). Ketiga, perkembangan teknologi informasi yang semakin terjangkau membuka peluang bagi pengembangan sistem pelaporan berbasis digital yang dapat mengintegrasikan green tagging secara otomatis ke dalam platform Siskeudes.

Berdasarkan analisis hambatan dan peluang tersebut, penelitian ini merumuskan model implementasi green budgeting yang bersifat bertahap (phased approach) dan adaptif terhadap konteks lokal. Model ini terdiri atas tiga fase utama: (1) fase fondasi, yaitu penguatan literasi dan penyusunan panduan teknis; (2) fase integrasi, yaitu penerapan green tagging dalam siklus perencanaan APBDes; dan (3) fase pelembagaan, yaitu formalisasi mekanisme pengawasan dan pelaporan berbasis keberlanjutan melalui Pokja Green Budgeting. Pendekatan bertahap ini sejalan dengan prinsip adaptive governance yang ditekankan oleh Leach et al. (2021) sebagai strategi transformasi yang efektif dalam konteks kapasitas kelembagaan yang terbatas.

Sintesis Hasil

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa:

i. Terdapat kesenjangan signifikan antara praktik penganggaran desa dengan prinsip keberlanjutan
ii. Intervensi berbasis pelatihan dan pendampingan efektif meningkatkan literasi dan pemahaman aparatur desa

iii. Implementasi awal green budgeting dimungkinkan melalui penyediaan toolkit dan pembentukan kelembagaan pendukung
iv. Hasil ini menegaskan bahwa transformasi menuju tata kelola keuangan desa yang berkelanjutan memerlukan kombinasi antara peningkatan kapasitas, inovasi instrumen, dan penguatan kelembagaan (OECD, 2020; World Bank, 2021).

Secara lebih luas, hasil penelitian mendukung literatur global yang menyatakan bahwa transformasi menuju keuangan publik berkelanjutan memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup kebijakan fiskal, inovasi instrumen, serta penguatan kelembagaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menekankan bahwa transisi menuju pembangunan berkelanjutan memerlukan perubahan struktural dalam tata kelola ekonomi dan kebijakan publik (Leach et al., 2021). Selain itu, integrasi konsep *green budgeting* di tingkat desa juga dapat dilihat sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi sirkular dan berkelanjutan (Kirchherr et al., 2022).

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Srengat masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang berfokus pada belanja fisik dan administratif, sehingga belum mengintegrasikan prinsip *Sustainable Development* secara sistematis dalam proses penganggaran.

Menjawab identifikasi masalah pertama, penelitian ini menemukan bahwa literasi aparatur desa terkait keuangan berkelanjutan masih rendah, yang berdampak pada belum dipahaminya konsep *sustainable finance*, *green budgeting*, dan *green tagging*. Kedua, terkait implementasi, penelitian menunjukkan bahwa praktik *green budgeting* dan *green tagging* belum diterapkan dalam penyusunan APBDes. Ketiga, penelitian juga mengonfirmasi bahwa belum tersedia panduan teknis klasifikasi kegiatan hijau, sehingga aparatur desa tidak memiliki acuan operasional dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam anggaran.

Namun demikian, intervensi yang dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan terbukti mampu memberikan perubahan awal. Aparatur desa mengalami peningkatan pemahaman terkait konsep *green budgeting*, mulai mampu mengidentifikasi kegiatan yang berdampak lingkungan, serta menghasilkan draft toolkit klasifikasi kegiatan hijau yang kompatibel dengan sistem keuangan desa. Selain itu, terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) *Green Budgeting* menunjukkan adanya penguatan kelembagaan sebagai langkah awal menuju keberlanjutan program.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi menuju tata kelola keuangan desa yang berkelanjutan dalam perspektif *Public Finance* dapat

dilakukan secara bertahap, melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan instrumen teknis, serta dukungan kelembagaan yang memadai.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan turunan yang mengintegrasikan *green budgeting* ke dalam pengelolaan APBDes secara formal. Selain itu, diperlukan standarisasi klasifikasi kegiatan hijau sebagai pedoman yang dapat diimplementasikan secara seragam di seluruh desa.

Aparatur desa disarankan untuk mulai mengintegrasikan *green tagging* secara bertahap dalam proses perencanaan dan penganggaran. Di sisi lain, peran Pokja Green Budgeting perlu diperkuat sebagai motor penggerak implementasi dan pengawasan keberlanjutan program di tingkat desa.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan kuantitatif guna mengukur dampak implementasi *green budgeting* terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, studi komparatif antar daerah juga diperlukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dalam penerapan keuangan berkelanjutan di tingkat lokal.

Ucapan Terimakasih

Tim peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh aparatur desa dan perangkat kecamatan di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, atas partisipasi aktif dan keterbukaan dalam proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pelaku ekonomi lokal dan pendamping desa yang telah memberikan data, informasi, serta dukungan selama kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan berlangsung. Penelitian ini terlaksana atas dukungan Universitas Brawijaya dan Universiti Malaya dalam kerangka kolaborasi riset pengabdian masyarakat bidang keuangan publik berkelanjutan

Daftar Pustaka

Ahmad, M. , Jiang, P. , Murshed, M., Shehzad, K., Akram, R. , Cui, L. , & Khan, Z. (2021). Modelling the dynamic linkages between eco-innovation, urbanization, and environmental sustainability: Does green finance matter? . *Environmental Science and Pollution Research*, *28*, 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11356-021-12345-6

Andrews, R., Beynon, M. J., & McDermott, A. (2021). Organizational capability in the public sector: A review of evidence. *Public Administration Review*, *81*(3), 1–12.

Bappenas. (2021). *Low Carbon Development Indonesia Report*. .

Chen, Y., Zhang, Y., & Liu, Z. (2022). Green finance and carbon neutrality: Evidence from emerging markets. *Finance Research Letters*, *48*.

Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. .

Gupta, S. , L. C. , & C. B. (2022). Fiscal policy for sustainable development. . *Public Budgeting & Finance, 42(3), 5–25.* , *42*(3), 5–25.

Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Kementerian Desa, P. D. T. dan T. (2023). *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023*.

Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2022). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. . *Resources, Conservation and Recycling*, *127*, 221–232.

Leach, M. , Scoones, I. , & Stirling, A. (2021). Dynamic sustainabilities: Technology, environment, social justice. *World Development*, 1–15.

Li, X., Ouyang, X., & Du, K. (2021). The impact of green finance on environmental quality: Evidence from China. *Sustainability*, *13*(18).

Lledó, V., Yoon, S., Fang, X., Mbaye, S., & Kim, Y. (2021). Green budgeting: A tool for climate policy. *Climate Policy*, *21*(5), 1–14.

Matthew B., Miles, A., Michael Huberman, & Johnny Saldana. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* . Sage Publications.

OECD. (2020a). *Green Budgeting and Tax Policy Tools to Support Climate Action.* .

OECD. (2020b). *Paris collaborative on green budgeting: Green budgeting framework highlights*. https://www.oecd.org/environment/green-budgeting/

Pratiwi, R., Setiawan, D., & Nugroho, R. (2023). Sustainable village fund management in Indonesia: Challenges and opportunities. *Sustainability,* 15–2.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

UNDP. (2019a). *Budgeting for the SDGs: Aligning National Budgets with Sustainable Development Goals.* .

UNDP. (2019b). *Budgeting for the SDGs: Aligning National Budgets with Sustainable Development Goals.* .

Volz, U., Morgan, P., Yoshino, N., & Taghizadeh-Hesary, F. (2021). Climate change and green finance: Policy implications for sustainable development. *Ecological Economics*.

Wang, Y., Li, X., & Zhang, B. (2022). Green budgeting and environmental governance: Evidence from fiscal policy. *Sustainability*, *14*(0).

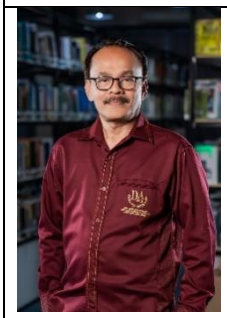
World Bank. (2021). *Climate-Sensitive Public Financial Management.* .

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* . Sage Publications. .

Zhang, D., Mohsin, M., Rasheed, A. K., Chang, Y., & Taghizadeh-Hesary, F. (2022). Public spending and green economic growth: A fiscal policy perspective. . *Journal of Environmental Management*, *313*.

Zhang, S., Wu, Z., Wang, Y., & Hao, Y. (2023). Green finance and sustainable development: Evidence from global economies. *Journal of Cleaner Production*.

Biografi Singkat Penulis

	Prof. Dr. Susilo merupakan Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Bidang keahlian beliau meliputi keuangan publik, ekonomi pembangunan, serta kebijakan fiskal daerah. Beliau aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, beliau juga terlibat dalam berbagai kegiatan akademik nasional maupun internasional serta publikasi ilmiah bereputasi.
	Al Muizzuddin Faazalloh, S.E., M.E., Ph.D merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Fokus penelitian beliau berada pada bidang keuangan, ekonomi pembangunan, serta sustainable finance. Beliau aktif menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal nasional dan internasional serta terlibat dalam berbagai riset terkait inklusi keuangan dan pembangunan berkelanjutan.
	Dr. Rizal Muwazir merupakan akademisi di Universiti Malaya dengan fokus keilmuan pada keuangan, kebijakan publik, dan ekonomi internasional. Beliau aktif dalam kegiatan penelitian lintas negara serta memiliki pengalaman dalam kolaborasi akademik internasional. Publikasi beliau banyak berkontribusi pada isu-isu keuangan global dan pembangunan berkelanjutan.
	Roekhudin, S.E., M.E merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan bidang keahlian di akuntansi sektor publik dan keuangan daerah. Beliau aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada tata kelola keuangan publik, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat daerah dan desa.

	Alvira 'Aina A'yun,S.E.,M.SEI merupakan dosen LB di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya dengan bidang keahlian di ekonomi. Beliau aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian Masyarakat yang berfokus pada kesejahteraan Masyarakat.